



**EKSISTENSI *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF
PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**EKSISTENSI ULTIMUM REMEDIUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADMINISTRATIF
PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Muhammad Rizky Subardy
2120113018

ABSTRAK

Keberadaan konsep *ultimum remedium* secara substansi pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dalam menangani tindak pidana perpajakan masih memiliki permasalahan-permasalahan. Data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2020, pemulihan kerugian pada pendapatan negara dari tindak pidana perpajakan dirasa tidak optimal. Selain itu, mekanisme penerapan *ultimum remedium* di dalam KUP tidak jelas dan masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal memaknai konsep *ultimum remedium*. Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai keberadaan konsep *ultimum remedium* pada KUP yang dikaitkan dengan unsur fundamental hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan *ultimum remedium* di dalam KUP pada penanganan tindak pidana administratif perpajakan sehingga dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan 2. bagaimanakah seharusnya *ultimum remedium* diterapkan dalam KUP untuk penanganan tindak pidana administratif perpajakan agar dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan mengenai KUP serta kajian mengenai tindak pidana administratif dan *ultimum remedium* yang dihubungkan dengan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari penelitian ini didapatkan hasil berupa: 1. KUP terakhir sebagaimana diubah dengan Undang-Undang HPP secara substansi dan teori memiliki pengaturan mengenai mekanisme *ultimum remedium* yang mampu untuk mengoptimalkan pemulihan pada kerugian pendapatan negara sehingga asas kemanfaatan dari KUP dapat tercapai dimana dalam pengaturannya, *ultimum remedium* telah diperkuat dengan pidana denda yang tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan (badan) yang apabila tidak dibayar akan dilakukan penyitaan terhadap aset terpidana sebagaimana Pasal 44C KUP dan hal tersebut menguatkan fungsi *ultimum remedium*. 2. KUP yang memberikan keadilan dan kepastian hukum didalamnya harus mengatur secara tegas mengenai adanya kewajiban tindakan administratif terlebih dahulu dalam penanganan tindak pidana administratif perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau instansi dibawahnya kepada pelanggar sedangkan KUP yang berlaku saat ini belum memberikan keadilan dan kepastian hukum karena *ultimum remedium* hanya diartikan sebagai mengakhirkan sanksi pidana dan belum mengakhirkan sistem peradilan pidana dimana tindakan administratif pada tindak pidana perpajakan tidak wajib dan hanya digantungkan (diskresi) dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium*, Hukum Pidana Administratif, Tindak Pidana Perpajakan

**THE EXISTENCE OF ULTIMUM REMEDIUM
IN ADMINISTRATIVE PENAL LAW PERSPECTIVE
TO HANDLING TAXATION CRIMES**

Muhammad Rizky Subardy
2120113018

ABSTRACT

The existence of ultimatum remedium concept substantially in general provisions on taxation (KUP) to handle an administrative crimes still have some problems. Based on the data from the ministry of finance at 2020, the recovery of losses in state revenue is not optimal. Moreover, the mechanism of ultimatum remedium its still unclear and there are still any different interpretations about the concept of ultimatum remedium in its application. Therefore, it is important to examine the existence of the concept of ultimatum remedium in KUP with the fundamental elements of law, namely justice, certainty, and utility principle. Based on this, the main issues in this thesis are 1. how KUP applies ultimatum remedium in handling taxation crimes that can recover losses on state revenues and 2. how should ultimatum remedium be applied in KUP for handling taxation crimes in order to fulfill justice and legal certainty. This thesis used a normative method by examining literature or secondary data in the form of laws and regulations regarding KUP, studies of administrative crimes and ultimatum remedium associated with the theory of justice, legal certainty, and certainty. From this research, the results are: 1. KUP as last amended by the HPP Act, have a regulation about the fines which cannot be replaced with imprisonment if not paid by the convict and the convict's assets will be confiscated as existence of article 44C KUP which therefore, will certainly strengthen the function of ultimatum remedium and the existence of ultimatum remedium KUP as last amended by the HPP Act capable of optimizing the recovery of state revenue losses so that the utility principle from KUP can be achieved. 2. KUP as last amended by the HPP Act has not provided justice and legal certainty because ultimatum remedium is only interpreted as to ending criminal sanctions and has not ending the criminal justice system. Where the existence of administrative actions on taxation crimes are dependent (discretion) from the Directorate General of Taxes while the KUP which provides justice and legal certainty in it must strictly regulate the existence of administrative action obligations.

Keyword: Ultimatum Remedium, Administrative Penal Law, Taxation Crimes